



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua kalinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

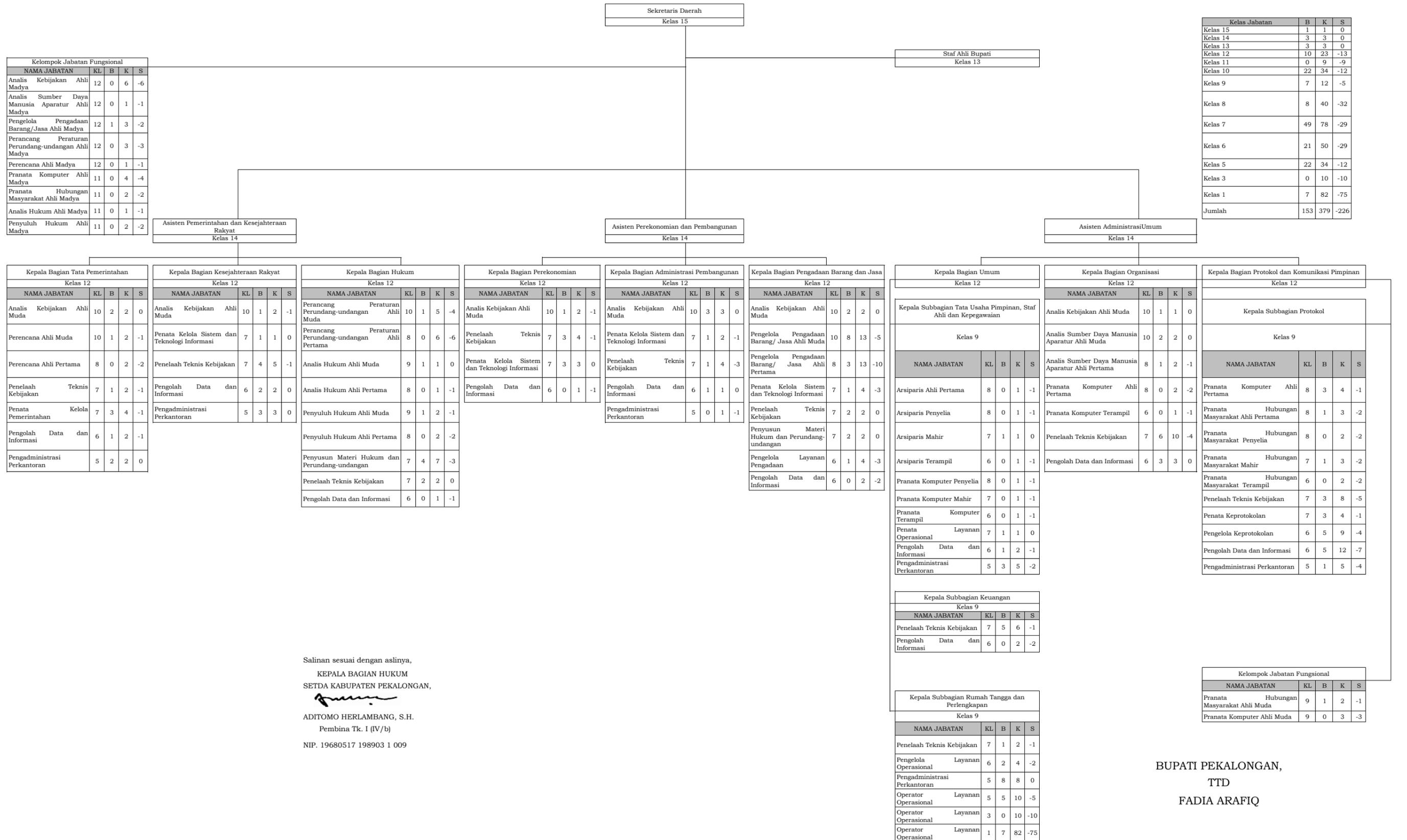
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH



Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14	3	3	0
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12	10	23	-13
Kelas 11	0	9	-9
Kelas 10	22	34	-12
Kelas 9	7	12	-5
Kelas 8	8	40	-32
Kelas 7	49	78	-29
Kelas 6	21	50	-29
Kelas 5	22	34	-12
Kelas 3	0	10	-10
Kelas 1	7	82	-75
Jumlah	153	379	-226

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	6	-6
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	1	-1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	1	3	-2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	4	-4
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	2	-2
Analisis Hukum Ahli Madya	11	0	1	-1
Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	0	2	-2

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Perencana Ahli Muda	10	1	2	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	2	-1
Penata Kelola Pemerintahan	7	3	4	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	5	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0

Kepala Bagian Hukum Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	1	5	-4
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	0	6	-6
Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	1	2	-1
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	4	7	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Bagian Perekonomian Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	3	4	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	3	3	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3	3	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	2	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	4	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	10	8	13	-5
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	8	3	13	-10
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	4	-3
Penelaah Kebijakan Teknis	7	2	2	0
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	2	2	0
Pengelola Layanan Pengadaan	6	1	4	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2

Kepala Bagian Umum Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	6	10	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0

Kepala Bagian Organisasi Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	6	10	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kelas 12				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	4	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	3	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	2	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	3	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
Penelaah Kebijakan Teknis	7	3	8	-5
Penata Keprotokolanan	7	3	4	-1
Pengelola Keprotokolanan	6	5	9	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	5	12	-7
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	5	-4

Kepala Subbagian Keuangan Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Kebijakan Teknis	7	5	6	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2

Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	2	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	2	4	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	8	8	0
Operator Layanan Operasional	5	5	10	-5
Operator Layanan Operasional	3	0	10	-10
Operator Layanan Operasional	1	7	82	-75

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	3	-3

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,  
  
 ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN,  
 TTD  
 FADIA ARAFIQ

Keterangan :  
 KL : Kelas Jabatan  
 B : Jumlah Pegawai yang tersedia  
 K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja  
 S : Selisih